



Kegiatan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa

Inspektur Kabupaten Seluma telah memprakarsai kegiatan penting berupa Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa sebagai langkah preventif dan sinergi antar lembaga. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Oktober 2025, dimulai pukul 09.00 hingga selesai, bertempat di Kantor Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Inspektorat Kabupaten Seluma dengan Kejaksaan Negeri Seluma, menunjukkan komitmen bersama dalam pengawasan keuangan desa.

Tim pelaksana kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Pembantu dan Auditor dari Inspektorat, serta didukung oleh Perwakilan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Seluma yang bertindak sebagai narasumber utama terkait aspek hukum. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi seluruh komponen Desa Napal Melintang, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perwakilan BPD, serta tim pengawas internal. Kehadiran Jaksa dalam kegiatan ini bertujuan utama untuk memberikan pemahaman dan edukasi hukum yang mendalam terkait pengelolaan keuangan dan aset desa kepada seluruh perangkat desa.

Tujuan strategis dari pendampingan hukum ini adalah untuk mencegah potensi terjadinya penyimpangan atau permasalahan hukum dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak dini. Dengan adanya pendampingan langsung dari aparat penegak hukum, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dipastikan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah preventif ini sangat krusial dalam melindungi perangkat desa dari risiko hukum di kemudian hari.

Melalui sinergi ini, hasil yang ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman yang signifikan dari perangkat Desa Napal Melintang mengenai aspek hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan secara awal potensi kerentanan atau masalah yang ada dalam administrasi keuangan desa. Pada akhirnya, kegiatan pendampingan ini menjadi katalisator bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, patuh hukum, dan berintegritas, sejalan dengan semangat "SELUMA ELOK, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN BERIMAN."